



PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO



PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN
ANGGARAN
2025

PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 900/ 0634 /2025

NOMOR : 170/ 6 /2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**
Jabatan : Bupati Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2. a. Nama : **EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
b. Nama : **ACHMAD FAQIH, M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
c. Nama : **SUMARDIYO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
d. Nama : **MUGI SUGENG, S.E., S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

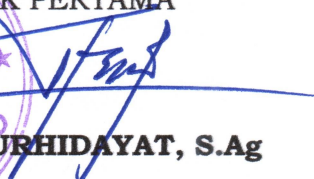
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Wonosobo, 19 Juni 2025

BUPATI WONOSOBO

Selaku

PIHAK PERTAMA


H. AFIE NURHIDAYAT, S.Ag

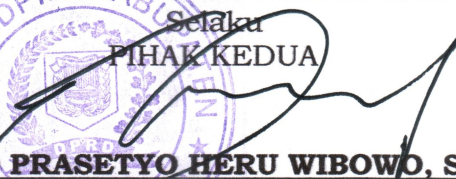


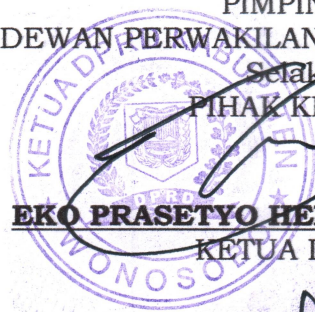
PIMPINAN

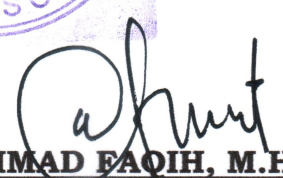
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selaku

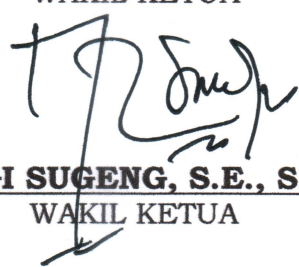
PIHAK KEDUA


EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD




ACHMAD FAQIH, M.H.
WAKIL KETUA


SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA


MUGI SUGENG, S.E., S.H.
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah beserta perangkat daerah yang akan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 untuk masing-masing urusan pemerintahan baik

menurut perangkat daerah maupun prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun oleh masyarakat diperlukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yaitu :

- a. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 dengan penganggaran.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo melalui komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Wonosobo.
- c. Sebagai dasar dan acuan Penyusunan RKA Perubahan-Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6906);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah mencakup keseluruhan penerimaan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan kewenangan pengelolaan penerimaan daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran daerah yang direncanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penerimaan daerah yang ditargetkan merupakan rencana penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana penerimaan daerah digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah yang direncanakan pada tahun berkenaan. Rencana penerimaan daerah tahun 2025 berisikan target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025. Rencana penerimaan daerah Tahun 2025 sejumlah Rp2.049.376.447.543,91 yang terdiri dari beberapa komponen penerimaan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Perubahan Rencana Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 berjumlah Rp379.925.532.651,00, terdiri dari:

1. Pajak Daerah sejumlah Rp129.500.911.000,00;
2. Retribusi Daerah sejumlah Rp208.908.715.767,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tetap sejumlah Rp27.804.572.231,00;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp13.711.333.653,00.

2. Pendapatan Transfer

Perubahan rencana pendapatan transfer tahun 2025 berjumlah Rp1.609.957.970.064,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp1.471.829.317.000,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp138.128.653.064,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan rencana lain-lain pendapatan daerah yang sah berjumlah

Rp786.000.000,00 berupa pendapatan hibah.

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perubahan rencana penerimaan pembiayaan tahun 2025 berjumlah Rp58.706.944.828,91 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sejumlah Rp33.706.944.828,91 dan Pinjaman Daerah sejumlah Rp25.000.000.000,00.

Perubahan rencana penerimaan daerah yang meliputi perubahan rencana pendapatan daerah dan perubahan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang akan digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan	%	Rencana Perubahan	%	Bertambah/ Berkurang	%
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	370.439.864.042	18,31	379.925.532.651,00	19,09	9.485.668.609,00	2,56
1.1.1	Pajak Daerah	142.085.000.000	7,02	129.500.911.000,00	6,51	(12.584.089.000,00)	(8,86)
1.1.2	Retribusi Daerah	198.126.653.597	9,79	208.908.715.767,00	10,49	10.782.062.170,00	5,44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.779.572.231	1,27	27.804.572.231,00	1,40	2.025.000.000,00	7,86
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.448.638.214	0,22	13.711.333.653,00	0,69	9.262.695.439,00	208,21
1.2	Pendapatan Transfer	1.651.720.111.000	81,65	1.609.957.970.064,00	80,88	(41.762.140.936,00)	(2,53)
1.2.1	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.536.807.893.000	75,97	1.471.829.317.000,00	73,94	(64.978.576.000,00)	(4,23)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.795.707.000	2,12	42.795.707.000,00	2,15	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	880.149.101.000	43,51	843.694.143.000,00	42,38	(36.454.958.000,00)	(4,14)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.425.785.000	2,20	15.373.207.000,00	0,77	(29.052.578.000,00)	(65,40)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	333.497.091.000	16,49	334.026.051.000,00	16,78	528.960.000,00	0,16
1.2.1.5	Dana Desa	235.940.209.000	11,66	235.940.209.000,00	11,85	0,00	0,00
1.2.1.6	Insentif Fiskal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	114.912.218.000	5,68	138.128.653.064,00	6,94	23.216.435.064,00	20,20
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	83.666.668.000	4,14	96.274.653.064,00	4,84	12.607.985.064,00	15,07
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	31.245.550.000	1,54	41.854.000.000,00	2,10	10.608.450.000,00	33,95
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	786.000.000	0,04	786.000.000,00	0,04	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	786.000.000	0,04	786.000.000,00	0,04	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.022.945.975.042	100,00	1.990.669.502.715,00	100,00	(32.276.472.327,00)	(1,60)
II.	PEMBIAYAAN						
2.1	Penerimaan Pembiayaan						
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.948.371.133	100,00	33.706.944.828,91	57,42	(10.241.426.304,09)	(23,30)
2.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Pinjaman Daerah	0	0,00	25.000.000.000,00	42,58	25.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.948.371.133	100,00	58.706.944.828,91	100,00	14.758.573.695,91	33,58
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.066.894.346.175		2.049.376.447.543,91		(17.517.898.631,09)	(0,85)

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo 2025

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2025 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 diarahkan untuk **“Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah:

1. **Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas** yang difokuskan pada :
 - a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui Penguatan infrastruktur jalan yang tahan bencana untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan pertanian.
 - b. Peningkatan layanan akses air limbah domestik layak melalui Perluasan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip kolaborasi.
 - c. Peningkatan layanan akses air minum aman di pedesaan melalui Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum dengan prinsip kolaborasi.
 - d. Peningkatan kinerja layanan irigasi melalui Peningkatan pengelolaan layanan irigasi.
 - e. Peningkatan keselamatan lalu lintas melalui Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.
 - f. Penanganan kawasan permukiman layak huni melalui Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif , inklusif dan berkelanjutan.

- g. Peningkatan instrumen penataan ruang melalui Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. **Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal** yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dengan prioritas pada Pengembangan sentra produksi pangan (SPP);
- b. Menjaga pasokan komoditas bahan pokok penting dan komoditas bersubsidi melalui Pelaksanaan Pemantauan harga, dan ketersediaan bahan pokok penting dan barang bersubsidi;
- c. Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dengan prioritas pada Peningkatan produksi, dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian;
- d. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan, dengan prioritas pada Perbaikan tata niaga perdagangan, Optimalisasi pemanfaatan pasar (pasar induk, pasar sapuran, pasar pagi), dan Menjaga stabilitas rantai pasok bahan pokok;
- e. Pengembangan destinasi dan potensi sektor pariwisata, dengan prioritas pada Pengembangan potensi wisata prioritas, Peningkatan daya tarik wisata, sarana prasarana dan promosi wisata, Pengembangan desa wisata, Pengembangan Geopark Dieng, dan Peningkatan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;
- f. Peningkatan pertumbuhan investasi, dengan prioritas pada Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha, dan Pengembangan investasi pada sektor pertanian dan pariwisata daerah;
- g. Peningkatan pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa, dengan prioritas pada, Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/ koperasi, Peningkatan kapasitas UMKM/ koperasi, dan Perluasan kemitraan UMKM/ koperasi;
- h. Pengembangan kapasitas dan potensi BUMDES, dengan prioritas pada, Pendampingan usaha BUMDES, dan Pengembangan potensi BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa;
- i. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif, dengan prioritas pada, Pendampingan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin, Peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha bagi rumah tangga miskin, dan Peningkatan produktivitas petani rumah tangga miskin / buruh tani;
- j. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, dengan prioritas pada, Perluasan lapangan kerja, dan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

3. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing** melalui :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan, dengan prioritas pada Peningkatan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan, dan Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan prioritas pada Peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas keluarga melalui perluasan cakupan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan Masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial, dengan prioritas pada Penurunan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, Penguatan sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program, Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, Peningkatan pemenuhan hak anak, dan Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, dengan prioritas pada, Peningkatan kecakapan pemuda di bidang pariwisata, pertanian dan pendukungnya, dan Peningkatan prestasi olahraga;

4. **Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah** melalui :

- a. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan prioritas pada, Pengoptimalan pengelolaan keuangan aset daerah, Pengoptimalan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang sah, Peningkatan kualitas kerja perencanaan, Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, Pengoptimalan peran legislatif dalam penyusunan kebijakan, dan Peningkatan kualitas pengawasan;
- b. Perwujudan pemerintahan yang kapabel, dengan prioritas pada, Peningkatan manajemen pengelolaan SDM dan kinerja aparatur, Peningkatan tata kelola informasi, dan Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik;
- c. Penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik, dengan prioritas pada, Peningkatan layanan informasi publik yang inklusif, Peningkatan pelayanan publik, dengan prioritas pada, Percepatan pencapaian SPM, Pengembangan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat, dan Peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik;

- d. Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan prioritas pada, Peningkatan keamanan dari bencana, kebakaran dan kekerasan, dan Peningkatan stabilitas keamanan Masyarakat;
- e. Peningkatan pemenuhan hak-hak politik, dengan prioritas pada, Peningkatan partisipasi politik masyarakat sesuai prinsip demokrasi;
- f. Peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat tata kelola informasi, dengan prioritas pada, Peningkatan semangat toleransi terhadap keberagaman;

5. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana melalui :

- a. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan, dengan prioritas pada, Konservasi lahan berbasis ekonomi, dan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan prioritas pada, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- c. Peningkatan kinerja layanan persampahan, dengan prioritas pada, Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan, dan Reformasi pengelolaan sampah sistemik hulu hilir terintegrasi;
- d. Perluasan wilayah yang berketahanan bencana, dengan prioritas pada Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana;

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam Perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 memuat:

- 1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
- 2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
- 3. Prioritas masing-masing perangkat daerah yang tercantum pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun sinergitas program dimaksud dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL 3.1 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Transformasi Ekonomi				
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek diduga cagar budaya yang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	a. Persentase obyek budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek budaya yang terinventarisir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	a. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase kelompok tani ikan yang aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase UPR aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	a. Persentase koperasi yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase koperasi produksi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar on line	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	a. Persentase usaha mikro yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Pertumbuhan Jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			d. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omset koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN	a. Rasio desa berlumbung pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase desa mandiri pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Ketersediaan pangan per kapita/ hari	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase cadangan pangan utama (beras)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMASARAN	a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan Jumlah kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	a. Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	a. Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Indeks kelembagaan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	a. Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	a. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah komoditas ekspor	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	a. Presentase Toko Modern yang memasarkan Produk Lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Pertumbuhan omzet market place lokal produk UMKM	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	a. Persentase pasar dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase kios/los yang dimanfaatkan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera ulang	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			e. Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			f. Pertumbuhan Jumlah sentra industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			g. Persentase klaster kategori berkembang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase JUT yang berada di sentra produksi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase tempat pemotongan hewan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	a. Jumlah produksi tanaman pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Jumlah produksi tanaman hortikultura sayur-	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Jumlah produksi Bunga	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Jumlah produksi tanaman biofarmaka	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			e. Jumlah produksi tanaman perkebunan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			f. Jumlah Populasi ternak	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			g. Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			h. Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			i. Jumlah produksi tanaman hortikultura buah-	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			j. Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYULUHAN	a. Persentase kelompok tani aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase gapoktan aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase petani ruta misin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang berizin	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	a. Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Persentase jumlah wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	a. Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase bangunan gedung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BAB)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	a. Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan	
			b. Persentase panjang jalan kabupaten yang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	a. Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			c. Persentase Terminal Tipe C Kondisi Baik dan berfungsi optimal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			d. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			e. Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			f. Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			g. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			h. Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			i. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			j. Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			k. V/C Rasio pada jalan kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	a. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			c. Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi (50%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	a. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2	Transformasi Sosial				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	a. Persentase atlet berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase Cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	a. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase pemuda berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase wirausaha muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase posyandu dengan strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase poskestren aktif	Dinas Kesehatan	
			d. Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Dinas Kesehatan	
			e. Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	Dinas Kesehatan	
			c. Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	
			d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin OpeRasional	Dinas Kesehatan	
			e. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	
			f. Indeks kepuasan pelanggan labkesda	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			g. Rata- rata capaian SPM puskesmas	Dinas Kesehatan	
			h. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			i. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			j. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			k. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			l. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			m. Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			n. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
			o. Persentase desa ODF	Dinas Kesehatan	
			p. Persentase sarana air minum yang sesuai	Dinas Kesehatan	
			q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			r. Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	RSUD Setjonegoro	
			s. Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	RSUD Setjonegoro	
			t. Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Dinas Kesehatan	
			u. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	
			v. Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Dinas Kesehatan	
			w. Prevalensi Gizi Buruk pada anak balita	Dinas Kesehatan	
			x. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
			y. Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			z. Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			aa. Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			ab. Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			ac. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			ad. Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			ae. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			af. Persentase merokok penduduk usia < 18	Dinas Kesehatan	
			ag. Angka kesakitan penyakit menular	Dinas Kesehatan	
			ah. Angka kesakitan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	
			ai. Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	Dinas Kesehatan	
			aj. Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online	Dinas Kesehatan	
			ak. Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	a. Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan BLUD
			b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Dinas Kesehatan	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	RSUD Setjonegoro	
			d. Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	a. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Persentase anggaran responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Persentase APBDes responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Cakupan layanan konseling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan Lembaga Layanan tingkat desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Rasio kecukupan guru kelas SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Rasio ketercukupan Guru SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGELOLAAN	a. APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			e. Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			f. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			g. Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			h. Persentase sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			i. Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			j. Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			k. PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			l. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			m. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			n. Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			o. Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			p. Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			q. Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	a. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			g. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			h. Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			i. Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Drop out KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Kebersertaan KB Pria	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Rata-rata Jumlah anak per keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	a. Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN	a. Persentase perpustakaan terakreditasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase pustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase koleksi digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			d. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase penambahan koleksi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			f. Persentase peningkatan kunjungan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	a. Persentase Arsip Digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan (NSPK)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	a. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase KPM PKH graduasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	a. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			e. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3	Transformasi Tata Kelola				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	
			b. Persentase tindak lanjut hasil review APIP	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	a. Persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko	Inspektorat	
			b. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat	
			c. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
			b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Badan Kepegawaian Daerah	
			b. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Daerah	
			c. Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	
			d. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
			e. Persentase ASN berkinerja baik	Badan Kepegawaian Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Persentase penurunan konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			b. Persentase penyelesaian kasus / kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase kasus / kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan Jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase tanah aset pemda yang		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase silpa terhadap APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			c. Persentase penyerapan belanja transfer	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase kenaikan PAD		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase progres tahapan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase capaian kinerja program bidang ekonomi terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			f. Persentase capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			g. Persentase capaian kinerja program bidang Infrastruktur dan kewilayahan terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			c. Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase kesesuaian program RKPD dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase keterisian data capaian indikator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	a. Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase inovasi yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Sekretariat Daerah	
			c. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	
			d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan	Sekretariat Daerah	
			e. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Sekretariat Daerah	
			c. Level kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah	
			d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang	Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Rata rata nilai RB perangkat daerah	Sekretariat Daerah	
			Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	Sekretariat Daerah	
			Cakupan layanan administrasi umum	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	a. Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			b. Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			c. Persentase kegiatan DPRD yang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Rasio kepemilikan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			c. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase cakupan updating data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			d. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			d. Persentase Desa dan Kelurahan tangguh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja	
			b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
			c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	a. Nilai Kebijakan Internal SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Managemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	a. Nilai Aksesibilitas Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Kelembagaan PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Semua Perangkat Daerah	
			b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung	Semua Perangkat Daerah	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
			e. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase BUMDes berkembang dan maju	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase BUMDes berbadan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase desa berkinerja baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	a. Persentase PKK aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Posyandu aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENATAAN DESA	a. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	a. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia				
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase ketaatan Pengampu usaha dan.atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase Penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	Dinas Lingkungan Hidup	
			c. Persentase mata air yang rusak dan.atau menurun debitnya	Dinas Lingkungan Hidup	
			d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup	
			e. Persentase Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase ketersediaan dokumen KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	a. Persentase tersedianya fasilitas TPS 3R skala kelurahan/desa	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	

TABEL 3.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Didukung Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas				
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	a. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase obyek budaya yang terinventarisir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	a. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase kelompok tani ikan yang aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase UPR aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	a. Persentase koperasi yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase koperasi produksi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar on line	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	a. Persentase usaha mikro yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Pertumbuhan Jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			d. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omset koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	a. Persentase unit usaha mikro naik kelas	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Pertumbuhan omset usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio desa berlumbung pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			Persentase desa mandiri pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Ketersediaan pangan per kapita/hari	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase cadangan pangan utama (beras)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan Jumlah kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	a. Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	a. Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Indeks kelembagaan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	a. Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	a. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah komoditas ekspor	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	a. Presentase Toko Modern yang memasarkan Produk Lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Pertumbuhan omzet market place lokal produk UMKM	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Persentase kios/los yang dimanfaatkan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera ulang	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			e. Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			f. Pertumbuhan Jumlah sentra industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			g. Persentase klaster kategori berkembang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase JUT yang berada di sentra produksi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase tempat pemotongan hewan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Jumlah produksi tanaman pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Jumlah produksi tanaman hortikultura sayur-sayuran	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Jumlah produksi Bunga	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Jumlah produksi tanaman biofarmaka	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			e. Jumlah produksi tanaman perkebunan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			f. Jumlah Populasi ternak	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			g. Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			h. Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			i. Jumlah produksi tanaman hortikultura buah-buahan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			j. Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	a. Persentase kelompok tani aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase gapoktan aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase petani ruta misin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	a. Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Persentase jumlah wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	a. Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase bangunan gedung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BAB)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	a. Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			c. Persentase Terminal Tipe C Kondisi Baik dan berfungsi optimal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			e. Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			f. Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			g. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			h. Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			i. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			j. Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			k. V/C Rasio pada jalan kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	a. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi (25%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	a. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang berijin	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang perdagangan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Lebih Pintar, Sehat, Bugar, Berkarakter dan Adaptif Secara Inklusif dan Merata				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan BLUD
			b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			e. Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			f. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			g. Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			h. Persentase sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			i. Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			j. Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			k. PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			l. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			m. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			n. Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			o. Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			p. Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			q. Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			r. Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	a. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Rasio kecukupan guru kelas SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Rasio ketercukupan Guru SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	a. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	b. Persentase pemuda berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase wirausaha muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	a. Persentase atlet berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase Cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	Dinas Kesehatan	
			c. Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	
			d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin OpeRasional	Dinas Kesehatan	
			e. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	
			f. Indeks kepuasan pelanggan labkesda	Dinas Kesehatan	
			g. Rata- rata capaian SPM puskesmas	Dinas Kesehatan	
			h. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			i. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			j. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			k. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			l. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			m. Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			n. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	
			o. Persentase desa ODF	Dinas Kesehatan	
			p. Persentase sarana air minum yang sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			r. Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	RSUD Setjonegoro	
			s. Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	RSUD Setjonegoro	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	
			c. Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Dinas Kesehatan	
			d. Prevalensi Gizi Buruk pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
			e. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
			f. Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			g. Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			h. Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			i. Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			j. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			k. Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			l. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			m. Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	Dinas Kesehatan	
			n. Angka kesakitan penyakit menular	Dinas Kesehatan	
			o. Angka kesakitan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	
			p. Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	Dinas Kesehatan	
			g. Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online	Dinas Kesehatan	
			r. Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase posyandu dengan strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase poskestren aktif	Dinas Kesehatan	
			d. Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	a. Persentase Aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	RSUD Setjonegoro	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Persentase anggaran responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Persentase APBDes responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Cakupan layanan konseling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan Lembaga Layanan tingkat desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Rata-rata Jumlah anak per keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Drop out KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Kebersertaan KB Pria	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			g. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			h. Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			i. Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	a. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase KPM PKH graduasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	a. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			e. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase rata-rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a. Persentase perpustakaan terakreditasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase koleksi digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			d. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase penambahan koleksi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			f. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	a. Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan.atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
3 Peningkatan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan					
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	a. Persentase tersedianya fasilitas TPS 3R skala kelurahan/desa	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase Penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase ketersediaan dokumen KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	Dinas Lingkungan Hidup	
			c. Persentase mata air yang rusak dan.atau menurun debitnya	Dinas Lingkungan Hidup	
			d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Persentase Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	a. Persentase ketaatan Pengampu usaha dan.atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif					
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Rasio kepemilikan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			c. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase cakupan updating data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketentraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja	
			b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
			d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Badan Kepegawaian Daerah	
			b. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Daerah	
			c. Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	
			d. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
			e. Persentase ASN berkinerja baik	Badan Kepegawaian Daerah	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Persentase penurunan konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			b. Persentase penyelesaian kasus / kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase inovasi yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAMM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan (NSPK)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			d. Persentase Desa dan Kelurahan tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response Time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	a. Nilai Aksesibilitas Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Kelembagaan PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	a. Nilai Kebijakan Internal SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Managemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan Jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus / kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	Kecamatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase silpa terhadap APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			c. Persentase penyerapan belanja transfer	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase kenaikan PAD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			c. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase progres tahapan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase capaian kinerja program bidang ekonomi terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			f. Persentase capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			g. Persentase capaian kinerja program bidang Infrastruktur dan kewilayahan terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			b. Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			c. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Sekretariat Daerah	
			c. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Level kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			c. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	
			b. Persentase tindak lanjut hasil review APIP	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	a. Persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko	Inspektorat	
			b. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat	
			c. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	a. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase BUMDes berkembang dan maju	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase BUMDes berbadan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase desa berkinerja baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	a. Persentase PKK aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Posyandu aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENATAAN DESA	a. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
			b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Kecamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Semua Perangkat Daerah	
			b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Semua Perangkat Daerah	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
			e. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	

TABEL 3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas					
		A. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dengan prioritas pada penguatan infrastruktur jalan yang tahan bencana untuk mempercepat pengembagan sektor pariwisata dan pertanian				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				Persentase Panjang Jalan yang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		B. Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak, yaitu melalui perluasan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengeolaan air limbah domestik				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				b. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		C. Peningkatan layanan akses air minum aman di pedesaan dengan prioritas pada peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		D. Peningkatan kinerja layanan irigasi dengan fokus pada peningkatan pengelolaan layanan irigasi				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		E. Peningkatan keselamatan lalu lintas yang berprioritas pada peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				c. Persentase Terminal Tipe C Kondisi Baik dan berfungsi optimal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				d. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				e. Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				f. Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				g. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				h. Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				i. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				j. Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				k. V/C Rasio pada jalan kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		F. Penanganan kawasan permukiman layak huni, yaitu pada pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif dan				
		PROGRAM PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	a. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				c. Persentase rumah tanggan yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		a. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi (25%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		G. Peningkatan instrumen penataan ruang dengan prioritas pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan sejenisnya				
		PROGRAM PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				b. Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	a. Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				b. Persentase bangunan gedung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
2	Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal					
		A. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dengan prioritas pada pengembangan sentra produksi pangan (SPP):				
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produksi tanaman pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				b. Produksi tanaman hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				c. Produksi Bunga	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				d. Produksi tanaman biofarmaka	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				e. Produksi tanaman perkebunan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				f. Populasi ternak	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				g. Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				h. Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				i. Produksi tanaman hortikultura buah	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				j. Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang bersertifikasi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	a. Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				b. Persentase JUT yang berada di sentra produksi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				c. Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				d. Persentase tempat pemotongan hewan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Persentase gapoktan aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Ketersediaan pangan per kapita/hari	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				b. Persentase cadangan pangan utama (beras)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio desa berlumbung pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Persentase desa mandiri pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA	Persentase usaha pertanian yang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			B. Menjaga pasokan komoditas bahan pokok penting dan komoditas bersubsidi melalui pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			C. Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dengan prioritas pada peningkatan produksi dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian			
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				b. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				c. Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				d. Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				e. Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				f. Pertumbuhan Jumlah sentra	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				g. Persentase klaster kategori berkembang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang perdagangan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			D. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dengan fokus pada perbaikan tata niaga perdagangan dan optimalisasi pemanfaat pasar (pasar induk, pasar sapuran, pasar pagi) serta menjaga stabilitas rantai pasok bahan pokok			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	a. Persentase pasar dalam kondisi baik b. Persentase kios/los yang dimanfaatkan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah komoditas ekspor	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Toko Modern yang memasarkan Produk Lokal Persentase <i>market place</i> lokal yang memasarkan produk lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pertumbuhan omzet <i>market place</i> lokal produk UMKM	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera ulang	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			E. Pengembangan destinasi dan potensi sektor pariwisata, dengan prioritas pada Pengembangan potensi wisata prioritas, Peningkatan daya tarik wisata, sarana prasarana dan promosi wisata, Pengembangan desa wisata, Pengembangan geopark dieng serta Peningkatan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya			
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	a. Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik b. Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan b. Pertumbuhan Jumlah kemitraan pariwisata c. Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI	Indeks kelembagaan pariwisata Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	a. Persentase kluster ekonomi kreatif dengan status berkembang b. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan c. Pertumbuhan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	a. Persentase obyek budaya yang dilestarikan b. Persentase obyek budaya yang terinventarisir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				b. Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			F. Peningkatan pertumbuhan investasi dengan fokus pada Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha dan Pengembangan investasi pada sektor pertanian dan pariwisata daerah			
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				b. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	a. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				b. Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			G. Peningkatan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan lembaga ekonomi desa yang berprioritas pada peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/Koperasi, peningkatan kapasitas UMKM/Koperasi, Perluasan kemitraan UMKM/Koperasi			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	a. Persentase usaha mikro yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				b. Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	a. Pertumbuhan jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	a. Persentase koperasi yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				b. Persentase koperasi produksi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				c. Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omset koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			H. Pengembangan kapasitas dan potensi BUMDES, dengan fokus pada Pendampingan usaha BUMDES dan Pengembangan potensi BUMDES sebagai			
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase BUMDes berkembang dan maju	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase BUMDes berbadan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan	
				c. Persentase desa berkinerja baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				d. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		I. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif dengan prioritas pada Pendampingan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin, Peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha bagi rumah tangga miskin dan Peningkatan produktivitas petani rumah tangga miskin/buruh tani				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase rumah tangga miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/ UB	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		J. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berfokus pada Perluasan lapangan kerja dan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Persentase jumlah wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				b. Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing					
		A. Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada Peningkatan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dan Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				d. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				e. Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				f. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				g. Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				h. Persentase sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				i. Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				j. Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				k. PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				l. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				m. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				n. Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				o. Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				p. Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				q. Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				r. Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	a. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				c. Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Rasio kecukupan guru kelas SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Rasio ketercukupan Guru SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a. Persentase perpustakaan terakreditasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				b. Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				c. Persentase koleksi digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				d. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				e. Persentase penambahan koleksi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				f. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	a. Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				b. Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				c. Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan.atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			B. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas pada Peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dan Peningkatan kualitas keluarga melalui perluasan cakupan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	Dinas Kesehatan	
				c. Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	
				d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	Dinas Kesehatan	
				e. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	
				f. Indeks kepuasan pelanggan	Dinas Kesehatan	
				g. Rata-rata capaian SPM	Dinas Kesehatan	
				h. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				i. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				j. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				k. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
				l. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				m. Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	
				n. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	
				o. Persentase desa ODF	Dinas Kesehatan	
				p. Persentase sarana air minum yang sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				r. Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	RSUD Setjonegoro	
				s. Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	RSUD Setjonegoro	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				b. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	
				c. Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Dinas Kesehatan	
				d. Prevalensi Gizi Buruk pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
				e. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	
				f. Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				g. Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai	Dinas Kesehatan	
				h. Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
				i. Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				j. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				k. Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				l. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai	Dinas Kesehatan	
				m. Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	Dinas Kesehatan	
				n. Angka kesakitan penyakit menular	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				o. Angka kesakitan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	
				p. Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	Dinas Kesehatan	
				g. Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online	Dinas Kesehatan	
				r. Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat)	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
				c. Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase posyandu dengan strata mandiri	Dinas Kesehatan	
				c. Persentase poskestren aktif	Dinas Kesehatan	
				d. Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	Dinas Kesehatan	
				e. Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Semua Perangkat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	a. Rata-rata Indeks kepuasan layanan puskesmas	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan BLUD
				b. Lama Tunggu Pelayanan Obat Racikan	Dinas Kesehatan	
				c. Lama Tunggu Pelayanan Rawat	RSUD Setjonegoro	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Rata-rata Jumlah anak per	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
				b. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				c. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				d. Drop out KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				e. Kebersertaan KB Pria	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				c. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				d. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				f. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				g. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				h. Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				i. Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		C. Peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial yang berprioritas pada Penurunan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, Penguatan sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program, Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan, Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, Peningkatan pemenuhan hak anak dan Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak				
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	a. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				d. Persentase KPM PKH graduasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				c. Persentase rata-rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	a. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				d. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				e. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Persentase kelengkapan Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				c. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				d. Persentase anggaran responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				e. Persentase APBDes responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				f. Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Cakupan layanan konseling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
				b. Cakupan Lembaga Layanan tingkat desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	a. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				b. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			PROGRAM PENATAAN DESA	a. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				b. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	a. Persentase PKK aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				b. Persentase Posyandu aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan		
				c. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				d. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			D. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dengan berprioritas pada Peningkatan kecakapan pemuda dibidang pariwisata, pertanian dan pendukungnya dan Peningkatan prestasi olahraga				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
				Persentase pemuda berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
				Persentase wirausaha muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	a. Persentase atlet berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
				b. Persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
				c. Persentase Cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
				d. Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
4	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah						
		A. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan prioritas pada Pengoptimalan pengelolaan keuangan aset daerah, Pengoptimalan pemanfaatan sumber - sumber pendapatan yang sah, Peningkatan kualitas kerja perencanaan, Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, Pengoptimalan peran legislatif dalam penyusunan kebijakan dan Peningkatan kualitas pengawasan					
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
			b. Persentase silpa terhadap APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
			c. Persentase penyerapan belanja transfer	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
			d. Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
				b. Persentase tanah aset pmda yang bersertifikat	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
				b. Persentase kenaikan PAD		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				b. Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				c. Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				d. Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	e. Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				a. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				b. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				c. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				d. Persentase progres tahapan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				e. Persentase capaian kinerja program bidang ekonomi terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				f. Persentase capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				g. Persentase capaian kinerja program bidang Infrastruktur dan kewilayahan terhadap target kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan	Sekretariat Daerah	
				b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan	Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	Sekretariat Daerah	
				b. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan	Sekretariat Daerah	
				c. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	
				d. Persentase rekomendasi hasil KOORDINASI Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan	Sekretariat Daerah	
				e. Rata rata nilai RB Perangkat	Sekretariat Daerah	
				f. Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Level kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah	
				b. Persentase rekomendasi hasil KOORDINASI Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
				c. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Semua Perangkat Daerah	
				b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Semua Perangkat Daerah	
				c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	
				d. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
				e. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat	Semua Perangkat Daerah	
				a. Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	b. Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				c. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	
				b. Persentase tindak lanjut hasil review APiP	Inspektorat	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	a. Persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen	Inspektorat	
				b. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat	
				c. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang	Kecamatan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan	Kecamatan	
		B. Perwujudan pemerintahan yang kapabel dengan fokus pada Peningkatan manajemen pengelolaan SDM dan kinerja aparatur, Peningkatan tata kelola informasi, Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik				
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Badan Kepegawaian Daerah	
				b. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Daerah	
				c. Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	
				d. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
				e. Persentase ASN berkinerja baik	Badan Kepegawaian Daerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Indeks Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				b. Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				c. Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				d. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				e. Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		C. Penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik dengan berprioritas pada Peningkatan layanan informasi publik yang inklusif				
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	a. Nilai Aksesibilitas Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				b. Nilai Informasi Tersedia Setiap	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				c. Nilai Kelembagaan PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	a. Nilai Kebijakan Internal SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				b. Nilai Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				c. Nilai Managemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
D. Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas pada Percepatan pencapaian SPM, Pengembangan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat dan Peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik.						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
				b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	Kecamatan	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				b. Persentase cakupan updating data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				b. Rasio Kepemilikan KTP berbasis	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				a. Rasio kepemilikan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				b. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	c. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase inovasi yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Rata rata nilai RB perangkat daerah	Sekretariat Daerah	
				Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	Sekretariat Daerah	
				Cakupan layanan administrasi umum	Sekretariat Daerah	
E. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan fokus pada Peningkatan keamanan dari bencana, kebakaran dan kekerasan, Peningkatan stabilitas keamanan masyarakat						
		PROGRAM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
				d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan	Satuan Polisi Pamong Praja	
				Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	Kecamatan	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
				b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				d. Persentase Desa dan Kelurahan tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				a. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	b. Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response Time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				F. Peningkatan pemenuhan hak - hak politik dengan prioritas pada peningkatan partisipasi politik masyarakat sesuai prinsip demokrasi			
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Persentase peningkatan Jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			G. Peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat tata kelola informasi dengan fokus pada Peningkatan semangat toleransi terhadap keberagaman				
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	a. Persentase penurunan konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	b. Persentase penyelesaian kasus / kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase kasus / kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
5.	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana						
		A. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan prioritas pada konservasi lahan berbasis ekonomi dan Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup					
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	Dinas Lingkungan Hidup			
			b. Persentase ketersediaan dokumen KLHS	Dinas Lingkungan Hidup			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	a. Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan	Dinas Lingkungan Hidup			
			b. Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	Dinas Lingkungan Hidup			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1				c. Persentase mata air yang rusak dan atau menurun debitnya	Dinas Lingkungan Hidup	
				d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup	
				e. Persentase Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			B. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan fokus pada Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase ketaatan Pengampu usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup	
				b. Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	
			C. Peningkatan kinerja layanan persampahan dengan berprioritas pada Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan dan Reformasi pengelolaan sampah sistematis hulu hilir terintegrasi			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan	Dinas Lingkungan Hidup	

			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase tersedianya fasilitas TPS 3R skala kelurahan/desa	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENGELOLAAN	a. Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				b. Persentase Penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	pengaduan masyarakat di bidang lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
			D. Perluasan wilayah yang berketahanan bencana dengan fokus pada Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan pembicaraan pendahuluan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan.

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah adalah

sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sejumlah Rp 1.233.948.841.624,91. Terdiri dari
 - 1.1. Bidang Pendidikan : Rp 656.611.994.825,00
 - 1.1.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga : Rp 656.611.994.825,00
 - 1.2. Bidang Kesehatan : Rp 390.290.754.169,00
 - 1.2.1. Dinas Kesehatan dan Puskesmas : Rp 216.541.593.366,00
 - 1.2.2. RSUD KRT. Setjonegoro : Rp 173.749.160.802,91
 - 1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Rp 107.079.869.207,00
 - 1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Rp107.079.869.207,00
 - 1.4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp24.095.821.185,00
 - 1.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan : Rp24.095.821.185,00
 - 1.5. Bidang Ketentraman. Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat : Rp16.506.410.469,00
 - 1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja : Rp 80293.629.895,00
 - 1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Rp 8.212.780.574,00
 - 1.6. Bidang Sosial : Rp 39.363.991.770,00
 - 1.6.1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Rp39.363.991.770,00
2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sejumlah Rp123.970.330.681,00. Terdiri dari
 - 2.7. Bidang Tenaga Kerja : Rp 10.293.540.260,00
 - 2.7.1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi : Rp10.293.540.260,00
 - 2.8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp763.570.903,00
 - 2.8.1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp763.570.903,00
 - 2.9. Bidang Pangan : Rp 23.524.589.671,00
 - 2.9.1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan : Rp 23.524.589.671,00
 - 2.10. Bidang Pertanahan : Rp 186.054.387,00
 - 2.10.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan : Rp186.054.387,00
 - 2.11. Bidang Lingkungan Hidup : Rp 20.395.846.365,00

- 2.11.1. Dinas Lingkungan Hidup : Rp 20.395.846.365,00
- 2.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
Rp7.048.233.574,00
 - 2.12.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Rp 7.048.233.574,00
- 2.13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Rp 5.962.184.962,00
 - 2.13.1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
Rp5.962.184.962,00
- 2.14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
Rp15.980.815.461,00
 - 2.14.1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
Rp15.980.815.461,00
- 2.15. Bidang Perhubungan : Rp 7.741.386.284,00
 - 2.15.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan :
Rp7.741.386.284,00
- 2.16. Bidang Komunikasi dan Informatika : Rp 9.814.287.071,00
 - 2.16.1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp 9.814.287.071,00
- 2.17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : Rp 1.052.089.043,00
 - 2.17.1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
Rp1.052.089.043,00
- 2.18. Bidang Penanaman Modal : Rp 4.581.865.800,00
 - 2.18.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
Rp4.581.865.800,00
- 2.19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga : Rp 7.340.000.000,00
 - 2.19.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga : Rp 7.340.000.000,00
- 2.20. Bidang Statistik : Rp 22.260.000,00
 - 2.20.1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp 22.260.000,00
- 2.21. Bidang Persandian : Rp 24.880.000,00
 - 2.21.1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp 24.880.000,00
- 2.22. Bidang Kebudayaan : Rp 2.684.852.553,00
 - 2.22.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : Rp 2.684.852.553,00
- 2.23. Bidang Perpustakaan : Rp 972.211.778,00
 - 2.23.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : Rp 972.211.778,00
- 2.24. Bidang Kearsipan : Rp 5.581.662.569,00
 - 2.24.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : Rp 5.581.662.569,00
- 3. Urusan Pemerintahan Pilihan sejumlah Rp 32.785.927.717,00. Terdiri dari
 - 3.25. Bidang Kelautan dan Perikanan : Rp 810.000.000,00

- 3.25.1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan : Rp 810.000.000,00
- 3.26. Bidang Pariwisata : Rp 8.446.302.489,00
 - 3.26.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : Rp 8.446.302.489,00
- 3.27. Bidang Pertanian : Rp 9.379.007.681,00
 - 3.27.1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan : Rp9.379.007.681,00
- 3.30. Bidang Perdagangan : Rp 13.726.552.185,00
 - 3.30.1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
Rp13.726.552.185,00
- 3.31. Bidang Perindustrian : Rp 424.065.362,00,00
 - 3.31.1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi :
Rp424.065.362,00
- 3.32. Bidang Transmigrasi : Rp 0,00
 - 3.32.1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi : Rp0,00
- 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah Rp 88.311.065.525,00.
Terdiri dari
 - 4.1. Sekretariat Daerah : Rp 43.211.578.073,00
 - 4.1.1. Bagian Pemerintahan : Rp 775.560.804,00
 - 4.1.2. Bagian Organisasi : Rp 472.563.596,00
 - 4.1.3. Bagian Hukum : Rp 436.647.068,00
 - 4.1.4. Bagian Kesejahteraan Rakyat : Rp 3.629.512.411,00
 - 4.1.5. Bagian Umum : Rp 34.848.098.946,00
 - 4.1.6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :
Rp993.684.273,00
 - 4.1.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Rp 970.982.166,00
 - 4.1.8. Bagian Administrasi Pembangunan : Rp 765.917.153,00
 - 4.1.9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : Rp 318.611.656,00
 - 4.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat : Rp 45.099.487.452,00
- 5. Unsur Penunjang Pemerintahan sejumlah Rp 466.486.230.839,00. Terdiri dari
 - 5.1. Perencanaan : Rp 8.394.136.918,00
 - 5.1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp 8.394.136.918,00
 - 5.2. Keuangan : Rp 450.868.536.050,00
 - 5.2.1. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah :
Rp 450.868.536.050,00
 - 5.3. Kepegawaian : Rp 6.954.247.871,00
 - 5.3.1. Badan Kepegawaian Daerah : Rp 6.954.247.871,00
 - 5.4. Penelitian dan Pengembangan : Rp 269.310.000,00
 - 5.4.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp 269.310.000,00

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sejumlah Rp 10.497.331.075,00.
Terdiri dari
 - 6.1. Inspektorat Daerah : Rp 10.497.331.075,00
 - 6.1.1. Inspektorat : Rp 10.497.331.075,00
7. Unsur Kewilayahan sejumlah Rp 85.937.362.219,00. Terdapat dari
 - 7.1. Kecamatan : Rp 85.937.362.219,00
 - 7.1.1. Kecamatan Wonosobo : Rp 10.495.652.479,00
 - 7.1.1.1. Kelurahan Wonosobo Barat : Rp 847.405.630,00
 - 7.1.1.2. Kelurahan Wonosobo Timur : Rp 853.332.000,00
 - 7.1.1.3. Kelurahan Jlamprang : Rp 1.001.737.267,00
 - 7.1.1.4. Kelurahan Kejiwan : Rp 759.297.904,00
 - 7.1.1.5. Kelurahan Sambek : Rp 867.729.483,00
 - 7.1.1.6. Kelurahan Mlipak : Rp 727.099.993,00
 - 7.1.1.7. Kelurahan Pagerkukuh : Rp 915.000.490,00
 - 7.1.1.8. Kelurahan Rojoimo : Rp 879.697.040,00
 - 7.1.1.9. Kelurahan Kramatan : Rp 728.446.565,00
 - 7.1.1.10. Kelurahan Tawang Sari : Rp 656.854.499,00
 - 7.1.1.11. Kelurahan Jaraksari : Rp 1.226.284.453,00
 - 7.1.1.12. Kelurahan Bumireso : Rp 853.304.592,00
 - 7.1.1.13. Kelurahan Kalianget : Rp 944.177.760,00
 - 7.1.2. Kecamatan Kertek : Rp 4.542.649.989,00
 - 7.1.2.1. Kelurahan Kertek : Rp 1.155.773.454,00
 - 7.1.2.2. Kelurahan Wringinanom : Rp 1.016.121.410,00
 - 7.1.3. Kecamatan Selomerto : Rp 4.000.620.291,00
 - 7.1.3.1. Kelurahan Selomerto : Rp 671.067.241,00
 - 7.1.3.2. Kelurahan Wonorejo : Rp 611.360.066,00
 - 7.1.4. Kecamatan Leksono : Rp 3.072.084.753,00
 - 7.1.4.1. Kelurahan Leksono : Rp 1.054.390.000,00
 - 7.1.5. Kecamatan Watumalang : Rp 3.693.048.123,00
 - 7.1.5.1. Kelurahan Wonoroto : Rp 599.898.400,00
 - 7.1.6. Kecamatan Mojotengah : Rp 4.708.007.016,00
 - 7.1.6.1. Kelurahan Kalibeper : Rp 771.327.419,00
 - 7.1.6.2. Kelurahan Mudal : Rp 1.111.613.963,00
 - 7.1.6.3. Kelurahan Andongsili : Rp 681.975.552,00
 - 7.1.7. Kecamatan Garung : Rp 3.881.533.469,00
 - 7.1.7.1. Kelurahan Garung : Rp 880.285.173,00
 - 7.1.8. Kecamatan Kejajar : Rp 4.702.664.861,00

- 7.1.8.1. Kelurahan Kejajar : Rp641.728.426,00
- 7.1.9. Kecamatan Kalikajar : Rp 3.270.364.772,00
 - 7.1.9.1. Kelurahan Kalikajar : Rp 1.250.899.132,00
- 7.1.10. Kecamatan Sapuran : Rp 3.701.075.623,00
 - 7.1.10.1. Kelurahan Sapuran : Rp 687.800.000,00
- 7.1.11. Kecamatan Kepil : Rp 3.431.841.149,00
 - 7.1.11.1. Kelurahan Kepil : Rp 733.208.030,00
- 7.1.12. Kecamatan Kaliwiro : Rp 3.549.373.249,00
 - 7.1.12.1. Kelurahan Kaliwiro : Rp 630.255.549,00
- 7.1.13. Kecamatan Wadaslintang : Rp 3.464.092.931,00
 - 7.1.13.1. Kelurahan Wadaslintang : Rp 713.900.000,00
- 7.1.14. Kecamatan Sukoharjo : Rp 2.583.409.267,00
- 7.1.15. Kecamatan Kalibawang : Rp 2.368.972.756,00
- 8. Unsur Pemerintahan Umum sejumlah Rp 7.439.357.863,00. Terdiri dari
 - 8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik : Rp 7.439.357.863,00
 - 8.1.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Rp 7.439.357.863,00

Perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program kegiatan disajikan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

Perubahan rencana belanja daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci diuraikan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan	%	Rencana Perubahan	%	Berkurang / Bertambah	%
1	BELANJA						
1.1	Belanja Operasi	1.483.115.784.127	71,76	1.465.034.760.647,91	71,49	(18.081.023.479,09)	(1,22)
1.1.1	Belanja Pegawai	867.677.690.562	41,98	917.203.043.850,00	44,76	49.525.353.288,00	5,71
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.382.654.327	26,63	484.935.545.097,91	23,66	(65.447.109.229,09)	(11,89)
1.1.3	Belanja Subsidi	755.155.000	0,04	693.155.000,00	0,03	(62.000.000,00)	(8,21)
1.1.4	Belanja Hibah	56.474.384.238	2,73	54.387.116.700,00	2,65	(2.087.267.538,00)	(3,70)
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.825.900.000	0,38	7.815.900.000,00	0,38	(10.000.000,00)	(0,13)
1.2	Belanja Modal	203.648.525.448	9,85	207.936.650.296,00	10,15	4.288.124.848,00	2,11
1.3	Belanja Tak Terduga	5.500.000.000	0,27	3.450.000.000,00	0,17	(2.050.000.000,00)	(37,27)
1.4	Belanja Transfer	374.630.036.600	18,13	372.955.036.600,00	18,20	(1.675.000.000,00)	(0,45)
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	14.881.618.600	0,72	14.881.618.600,00	0,73	0,00	0,00
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	359.748.418.000	17,41	358.073.418.000,00	17,47	(1.675.000.000,00)	(0,47)
Jumlah Belanja Daerah		2.066.894.346.175	100,00	2.049.376.447.543,91	100,00	(17.517.898.631,09)	(0,85)
Surplus/Defisit		(43.948.371.133)		(58.706.944.828,91)		(14.758.573.695,91)	

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2025

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan daerah diluar pendapatan daerah, dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran daerah diluar belanja daerah.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp33.706.944.828,91. Terdapat penurunan sebesar Rp10.241.426.304,09 dibandingkan SiLPA yang diprediksikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp43.948.371.133,00. Pinjaman daerah yang semula belum dianggarkan pada penetapan APBD Tahun 2025 menjadi Rp25.000.000.000,00.

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2025 tidak terdapat perubahan yaitu tetap sebesar Rp0,00 pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembiayaan netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp58.706.944.828,91, naik sebesar Rp14.758.573.695,91 dibanding penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp43.948.371.133,00. Kenaikan pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit belanja daerah serata guna mendukung pelaksanaan program dan atau kegiatan atas kebijakan pemerintah pusat. Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1**Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	%	Rencana Perubahan	%	Berkurang/ Bertambah	%
2.1	Penerimaan Pembiayaan						
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.948.371.133	100,00	33.706.944.828,91	57,42	(10.241.426.304,09)	(23,3)
2.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Pinjaman Daerah	0	0,00	25.000.000.000,00	42,58	25.000.000.000 ,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.948.371.133	100,00	58.706.944.828,91	100,00	14.758.573.695,91	33,58
2.2	Pengeluaran Pembiayaan						
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	43.948.371.133	100,00	58.706.944.828,91	100,00	14.758.573.695,91	33,58

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo. 2025

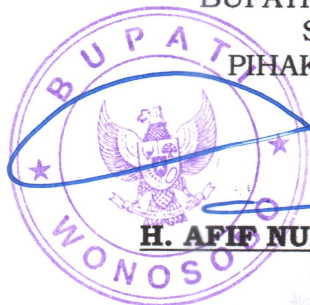
BAB VI

PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Tahun 2025. Dalam hal terdapat perkembangan keadaan dan/atau regulasi yang menyebabkan penambahan/pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan maupun pagu indikatif anggaran setelah kesepakatan terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, maka penyesuaian lebih lanjut dilaksanakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa merubah nota kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 yang telah ditandatangani.

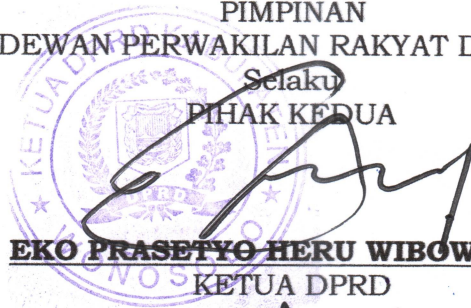
Wonosobo, Juni 2025

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA

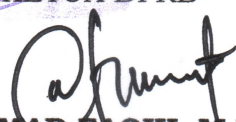


H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

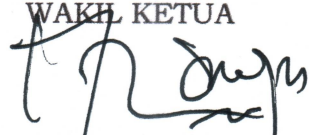
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA



EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD


ACHMAD FAQIH, M.H.
WAKIL KETUA


SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA


MUGI SUGENG, S.E., S.H.
WAKIL KETUA

